

# **Implementation of Modern Stores Minimarket Structuring Policy in**

## **Semarang City**

Diah Anggraeni Novitasari<sup>1</sup>), Dr. Sundarso, SU

**Ministry of Public Administration**

**Faculty of Social Science and Politics Science**

**University of Diponegoro**

Jl. Prof. Soedharto SH, Kampus Tembalang, Semarang

Email: [diahanggraeni1994@gmail.com](mailto:diahanggraeni1994@gmail.com)

### **Abstract**

Implementation of modern minimarket store structuring policy in Semarang City is one of the efforts made by the government in confronting the proliferation of establishments minimarket. Implementor of this policy is the Integrated Licensing Service Agency of Semarang and the Department of Industry and Trade of Semarang. The purpose of this research is to describe and analyze how the implementation of modern minimarket store structuring policy and to describe and analyze what are the factors that drive and impede the modern minimarket store structuring policy. Effectiveness of policy implementation process seen from five factors: appropriateness of the policy, the accuracy of the executor, the target accuracy, precision and accuracy of the support environment. Key factors driving and inhibiting the use of the theory of George C. Edwards III, communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research used a qualitative approach with descriptive type, which aims to illustrate how the process of policy implementation arrangement modern shops conducted in depth by looking at the facts that exist. Analysis techniques to acquire data through observation, interviews and document research. Drawing conclusions through interactive analysis belongs to Miles and Huberman to perform data reduction and data presentation. The results of research that is modern minimarket store planning policy in the city of Semarang has been running well, but there are still some things that have not been in accordance with existing regulations. Inhibiting factors of this policy is the lack of budget, facilities and infrastructure.

**Keywords: Policy, Implementation, Modern Store Minimarket**

# **Implementasi Kebijakan Penataan Toko Modern Minimarket di Kota**

## **Semarang**

Diah Anggraeni Novitasari<sup>1</sup>), Dr. Sundarso, SU

**Departemen Ilmu Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. Soedharto SH, Kampus Tembalang, Semarang

Email: [diahanggraeni1994@gmail.com](mailto:diahanggraeni1994@gmail.com)

### **Abstraksi**

Implementasi kebijakan penataan toko modern minimarket merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi permasalahan menjamurnya pendirian minimarket yang ada di Kota Semarang. Implementor dari kebijakan ini adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penataan toko modern minimarket dan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan penataan toko modern minimarket. Efektifitas proses implementasi kebijakan dilihat dari 5 faktor yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan dukungan. Faktor pendorong dan penghambat menggunakan teori George C. Edwards III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana proses implementasi kebijakan penataan toko modern yang dilakukan secara mendalam dengan melihat fakta-fakta yang ada. Teknik analisis untuk mendapatkan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Penarikan kesimpulan melalui analisis interaktif milik Miles dan Huberman dengan melakukan reduksi data dan penyajian data. Hasil penelitian yaitu kebijakan penataan toko modern minimarket di Kota Semarang sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan regulasi yang ada. Faktor penghambat dari kebijakan ini adalah tidak tersedianya anggaran, dan sarana prasarana.

**Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, Toko Modern Minimarket**

## 1. PENDAHULUAN

Eksistensi ritel tradisional misalnya pasar tradisional, toko kelontong, sebelum era globalisasi sangatlah tinggi, namun semakin berkembangnya zaman dan tuntutan serta *mindset* dari masyarakat yang menilai buruknya pelayanan dan pengelolaan infrastruktur dalam ritel tradisional, maka keberadaan ritel tradisional mulai tergerus di kalangan masyarakat. Ritel tradisional yang paling populer adalah dengan adanya keberadaan pasar tradisional.

Mulai menurunnya eksistensi pasar tradisional sebagai pasar yang menyediakan barang kebutuhan yang murah, terdapat faktor lain yaitu gaya hidup masyarakat akibat adanya arus globalisasi yang menginginkan adanya kemudahan dalam berbelanja. Hal inilah yang mendukung munculnya pasar modern atau ritel modern sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan serta fasilitas yang baik tanpa memperhitungkan harga yang ada di pasar modern seperti yang ada di pasar tradisional sebagai *icon* atas keberadaan pasar tradisional tersebut karena pendapatan masyarakat yang meningkat. Perubahan *mindset* inilah yang dijadikan faktor peluang bagi aktor yang memiliki modal besar untuk mendirikan pasar modern. Selain itu masalah zonasi juga turut mendukung menurunnya eksistensi dari ritel tradisional.

Sulistiyono mengemukakan dalam jurnal yang ditulis oleh Iqbal (2014: Vol. VIII. No. 3) bahwa ritel modern adalah ritel yang pengelolaannya secara modern dengan pola lokasinya yang terwujud dalam satu gedung serta lokasinya yang luas didukung dengan bentuk bangunannya yang megah. Pendirian ritel modern ini karakteristik dengan modal yang besar, tempat yang nyaman dan barangnya tersusun dengan rapi serta tampilan yang menarik daya minat pembeli. Keamanan yang diberikan di dalam ritel modern didukung dengan teknologi yang canggih untuk memberikan rasa aman bagi pembeli. Perbedaan juga langsung dapat dirasakan oleh konsumen ketika mereka berbelanja, yaitu mereka mengambil barang kebutuhan sendiri atau yang sering disebut dengan *self service*.

Permasalahan menjamurnya toko modern menjadi permasalahan empirik pada tiap daerah termasuk di Kota Semarang. Hal ini yang menjadikan peneliti menggunakan Kota Semarang sebagai lokus dari penelitian ini. Dari permasalahan tersebut peneliti juga melihat bagaimana berjalannya implementasi kebijakan penataan toko modern minimarket serta faktor yang mempengaruhinya. Selain itu dalam penelitian ini ditemukan sifat kebaruan yang ditemukan saat melakukan pemetaan dengan melihat lima penelitian terdahulu.

## **2. KERANGKA TEORI**

### **Administrasi Publik**

Administrasi publik menurut McCurdy (dalam Keban, 2008:3) mengemukakan bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipal untuk melakukan berbagai fungsi negara.

Menurut Keban (2008:8) harus diakui bahwa cakupan atau ruang lingkup administrasi publik sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Administrasi publik menurut Keban (2008:12) dianalogikan sebagai tubuh manusia yang hidup dalam suatu lingkungan, pernyataan tersebut dikarenakan terdapat hubungan internal antara satu unsur dengan unsur lain seperti otak, jantung dan urat nadi, organ tubuh, sistem sensor termasuk adaptasi dengan suhu atau kondisi yang mengelilingi tubuh manusia. Ruang lingkup yang terdapat di dalam administrasi publik menurut Keban (2008:10-11) tersebut minimal dapat dilihat dari enam dimensi strategis yaitu :

1. Dimensi Kebijakan
2. Dimensi Struktur Organisasi
3. Dimensi Manajemen
4. Dimensi Etika
5. Dimensi Lingkungan

### **Kebijakan Publik**

Dye (dalam Agustino, 2012:7) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Carl Friedrich (dalam Agustino, 2012:7) berpendapat bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Winarno (2007:32-34) proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan publik yaitu :

1. Penyusunan Agenda
2. Formulasi Kebijakan
3. Adopsi Kebijakan
4. Implementasi Kebijakan
5. Evaluasi Kebijakan

### **Implementasi Kebijakan**

Menurut Agustino (2012:138) implementasi kebijakan merupakan

suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan dipandang secara luas oleh Winarno (2007:144) mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Efektivitas kebijakan dilihat dari bagaimana implementasi kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Riant Nugroho (2009: 521-523) mengemukakan bahwa terdapat 5 prinsip dasar dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan yaitu:

1. Ketepatan Kebijakan
2. Ketepatan Pelaksana
3. Ketepatan Target
4. Ketepatan Lingkungan
5. Ketepatan Dukungan

Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa model yang dikemukakan oleh para ahli untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi implementasi tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan oleh George Edwards III dimana indikatornya adalah:

1. Komunikasi
2. Struktur Birokrasi
3. Sumber Daya
4. Disposisi

## **Ritel, Pasar, dan Toko Modern**

Pengertian Ritel atau eceran yang dikemukakan UNCTAD (dalam disertasi UNY 2013) merupakan mata rantai perdagangan distributor yang menjual pada konsumen akhir.

Menurut Perpres No.112/2007, Permendag No.70/2013 dan Perwal Semarang No.5/2013 Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat, perdagangan maupun sebutan lainnya.

Toko modern adalah toko yang dikelola dengan sistem pelayanan mandiri, dengan harga pasti dan atau dengan sistem *barcode* serta pencatatan pembayaran melalui komputer, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. (Perpres No.112/2007, Permendag No.70/2013 dan Perwal Semarang No.5/2013)

*Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi). (Perpres

No.112/2007, Permendag No.70/2013 dan Perwal Semarang No.5/2013).

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian Implementasi Kebijakan Penataan Toko Modern di Kota Semarang ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan suatu gejala sosial tertentu. Fokusnya adalah implementasi kebijakan toko modern. Adapun situs penelitian ini adalah Kota Semarang. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Semarang, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, Pemilik Toko Kelontong, Pelaku UMKM, dan Masyarakat Kota Semarang.

Jenis data adalah data primer seperti data statistik maupun data yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan dan observasi di lapangan, juga data sekunder yang bersumber dari data-data literatur, penelitian terdahulu, serta dokumen. Data yang sudah dikumpulkan dianalisis, kemudian disajikan, dan pada akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diberikan informan. Kualitas

atau keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi.

## 4. PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan penataan toko modern minimarket di Kota Semarang dilihat menggunakan lima ketepatan yang dikemukakan oleh Riant Nugroho. Sedangkan untuk melihat faktor pendorong dan penghambat menggunakan model yang dikemukakan oleh George Edwards III.

### 4.1 Implementasi kebijakan penataan toko modern minimarket di Kota Semarang

#### a. Ketepatan Kebijakan

Keberadaan kebijakan penataan toko modern minimarket yaitu Perwal No. 5 Tahun 2013 yang digunakan sebagai petunjuk pelaksanaannya menjadikan aktor implementor mengetahui pelaksanaan dalam penataan tersebut. Hal ini dikarenakan perwal tersebut digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan, payung hukum dan sebagai bentuk penyelesaian terkait masalah mengenai keberadaan toko modern.

Dampak negatif tidak begitu dirasakan oleh pedagang ritel tradisional dikarenakan mereka mengetahui kelebihan dan kekurangan dari usaha mereka terhadap ritel modern.

Pelanggaran ditemukan berupa jarak hal ini dikarekan terdapat dua

kemungkinan yaitu mengenai minimarket tersebut belum memiliki IUTM dan minimarket tersebut bisa jadi berdiri hanya memiliki IMB dan HO. Pelanggaran berikutnya yaitu jam operasional, laporan triwulan yang belum dijalankan oleh pihak minimarket.

Dalam penataan toko modern minimarket di Kota Semarang BPPT yang menangani masalah administratifnya yaitu berupa penerbitan dan perijinan usaha, sedangkan DISPERINDAG yang menangani masalah teknisnya yaitu terkait pengendalian dan pengawasan. Mengenai masalah pengawasan pihak DISPERINDAG hanya melaksanakan dalam setahun yaitu 1x terkadang 2x.

#### **b. Ketepatan Pelaksana**

Peran pemerintah disini sangat strategis karena kedudukan yang dibebankan akan mengikat bagi masyarakat yang menjadi sasarannya. Terkait kedudukan yang dibebankan, ketetapan kedudukan tersebut sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Penataan minimarket antara BPPT dan DISPERINDAG sudah bekerjasama dengan baik, dimana BPPT sebagai badan yang menerbitkan IUTM.

#### **c. Ketepatan Target**

Sasaran langsung dari kebijakan ini adalah pelaku usaha minimarket. Pelaku usaha minimarket nantinya diharapkan dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan, sehingga apa yang telah menjadi target tujuan

yang telah ditetapkan kebijakan tersebut dapat tercapai dengan baik selain itu tidak hanya pelaku usaha minimarket yang diuntungkan tetapi sasaran lain sebagai akibat dari munculnya minimarket tersebut merasakannya manfaat dari keluarnya kebijakan tersebut.

#### **d. Ketepatan Lingkungan**

Dalam kebijakan ini terdapat dua lingkungan yaitu lingkungan endogen dan lingkungan eksogen. Lingkungan endogen disini melihat hubungan yang dijalankan antara para implementor atau dengan unsur pelaksana lainnya dalam kebijakan penataan toko modern minimarket di Kota Semarang. Dari hasil penelitian, hubungan yang dijalankan sudah baik, hal ini terlihat adanya kerjasama yang baik antara DISPERINDAG dan BPPT. Kerjasama yang baik terlihat saat pengecekan lapangan dalam penerbitan IUTM.

Lingkungan eksogen menjelaskan pendapat masyarakat atau persepsi masyarakat dengan adanya kebijakan tersebut. Lingkungan eksogen disini adalah masyarakat di Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa lingkungan eksogen tersebut menerima dengan baik dengan keberadaan kebijakan penataan toko modern minimarket di Kota Semarang. Hal ini dikarenakan masyarakat khususnya usaha lokal menerima dampak dari keberadaan kebijakan tersebut, karena dengan

adanya kemitraan yang wajib dijalankan oleh pelaku usaha minimarket memberikan peluang pekerjaan bagi mereka khususnya usaha kecil di Kota Semarang.

#### **e. Ketepatan Dukungan**

Ketepatan dukungan dalam kebijakan penataan toko modern Minimarket berkaitan dengan strategi yang dijalankan oleh pemerintah dalam menghadapi dampak munculnya suatu kebijakan tersebut. Dalam hal ini ketetapan dukungan sudah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan strategi yang dijalankan oleh pemerintah sudah dijalankan. Ketepatan dukungan yang terkait dengan strategi yang dilakukan pemerintah adalah dengan upaya preventif. Sosialisasi terkait regulasi yang akan ditetapkan merupakan upaya preventif yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam menghadapi penolakan dari ditetapkannya kebijakan tersebut.

### **4.2 Faktor pendorong dan penghambat kebijakan penataan toko modern minimarket.**

#### **a. Komunikasi**

Faktor komunikasi dapat dikatakan baik, hal ini dibuktikan dengan kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan penataan toko modern minimarket di Kota Semarang yang dilaksanakan oleh DISPERINDAG dan BPPT Kota Semarang sudah dijalankan sesuai dengan apa yang

diamanatkan dalam Perwal No.5 Tahun 2013 sebagai regulasi teknis pelaksanaannya. Sasaran langsung secara jelas ditujukan kepada pelaku usaha minimarket yang akan mendirikan minimarket setelah ditetapkan kebijakan tersebut.

BPPT dan DISPERINDAG Kota Semarang dalam mengontrol dan mengintegrasikan keputusan terkait kebijakan penataan toko modern minimarket berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dalam mengontrol dan mengintegrasikan keputusan tersebut survey lapangan, rapat, dan koordinasi bersama antara pihak BPPT dan DISPERINDAG sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan kedua belah pihak dan tidak ada tumpang tindih yang diakibatkan pernyataan yang berbeda antara dua instansi tersebut. Hal ini juga membuktikan bahwa tingkat konsistensi dikatakan baik karena telah menjalankan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam kebijakan tersebut.

#### **b. Sumber Daya**

Implementasi kebijakan penataan toko modern minimarket di Kota Semarang pernyataan mengenai kuantitas antara DISPERINDAG dan BPPT berbeda. Upaya penerbitan IUTM dalam rangka penataan toko modern minimarket, salah satu tugas dari BPPT dan DISPERINDAG adalah melakukan pengecekan lapangan. Pengecekan lapangan disini dilakukan oleh tim teknis dimana berjumlah 4 orang, 2

orang dari pihak BPPT dan 2 orang dari DISPERINDAG. Menurut DISPERINDAG jumlah tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penataan toko modern minimarket namun dari pihak BPPT jumlah tersebut kurang memenuhi untuk menjalankan tugasnya terkait penataan toko modern minimarket.

#### **c. Disposisi**

Faktor disposisi dalam penelitian ini yang melibatkan DISPERINDAG dan BPPT berdasarkan hasil penelitian dikatakan sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan ritel modern minimarket tersebut sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam regulasi teknis pelaksanaannya yaitu Perwal No.5 Tahun 2013.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi khususnya DISPERINDAG dan BPPT sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, kaitannya dengan penataan toko modern minimarket dari DISPERINDAG diberikan wewenang kepada Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Kepala Seksi Pengendalian, mereka bertanggung kepada Kepala Bidang Perdagangan yang kemudian dari Kepala Bidang Perdagangan akan langsung bertanggung jawab kepada Kepala DISPERINDAG Kota Semarang. Sedangkan dari BPPT diberikan wewenang tersebut kepada Kepala Bidang Perijinan Perekonomian bersama tim teknisnya yang kemudian bertanggung jawab

langsung kepada Kepala BPPT Kota Semarang.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan penataan toko modern minimarket di Kota Semarang sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan regulasi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari segala pelaksanaannya sudah sesuai dengan regulasi teknis pelaksanaannya yaitu Perwal No.5 Tahun 2013. Namun ketika mengacu perwal tersebut masih ada beberapa hal yang belum berjalan dengan baik yaitu terkait dengan laporan triwulan yang belum dijalankan, jam operasional yang belum sesuai, dan munculnya minimarket di kemudian hari masih tidak bisa dipungkiri karena kuota maksimal dari Kota Semarang belum terpenuhi. Hal ini semakin membuat resah masyarakat.

Faktor pendorong dan penghambat dilihat dari pemahaman aktor implementor dalam melaksanakan kebijakan tersebut, dukungan dari kelompok sasaran dan adanya produk hukum untuk mendapatkan legitimasi. Sedangkan untuk faktor penghambat yaitu tidak tersedianya anggaran dan fasilitas yang kurang mencukupi.

## 5.2 SARAN

1. Dalam melakukan pengawasan sebaiknya pihak DISPERINDAG melakukan pengecekan lapangan kaitannya dengan pengawasan setahun 4 kali.
2. Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran sudah seharusnya dijalankan.
3. Perlu diadakannya alokasi anggaran dalam pengecekan lapangan dan sarana prasarana,
4. Perlunya kewajiban untuk memberikan laporan triwulan kepada DISPERINDAG.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo.2012.*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Keban, Yeremias T.2008.*Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media

Nugroho, D. Riant.2009. *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Pandin, Marina S. (2009), *The Portrait Of Retail Business In Indone-sia: Modern Market*. Jakarta: Economics.

Setianto, A. Yudi, dkk. (2008) *Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen (Perijinan, Pribadi, Keluarga, danBisnis)*. Jakarta : Pranita Offset.

Subarsono.2011.*Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono.2014.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta.

Winarno,Budi.2007.*Kebijakan Publik Teori & Proses*.Pringwulung : PT.Buku Kita

## Jurnal

Dewi, Ita Mutiara.(2013). Implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko Modern Berjaringan Nasional di Kabupaten Sleman Dalam Kajian Ekonomi Politik. *Disertasi*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Fitriana,Ciciek.(2014). Evaluasi Kebijakan Ritel Modern Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.*Skripsi*.Universitas Diponegoro.

Iqbal, Mahathir Muhammad.(2014). Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan, dan Pengelolaan Pasar Tradisional dan Toko Modern. *Pelopor*,8(3): 12-40.

Silviana.(2014). Intervensi Negara Dalam Mekanisme Pasar :

Kasus Penataan Ritel Modern Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta .*Sawala*, 3(1) : 13-33.

[s/2013/06/10/090487201/pasar-modern-sesaki-kota-semarang](http://s/2013/06/10/090487201/pasar-modern-sesaki-kota-semarang).

Diakses pada tanggal 11 November 2015 Pukul 16.00

Wardana, Andi Kusuma.(2013). Implementasi Hukum penataan Toko Modern di Kabupaten Jember berdasarkan Perpres No.112 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.*Skripsi*. Universitas Jember.

Sukmana, Yoga.2015.*Setahun Jokowi-JK, Pedagang Tradisional Masih Menanti Keberpihakan Pemerintah*. Dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/20/105852826/Setahun.Jokowi-JK.Pedagang.Pasar.Tradisional.Masih.Menanti.Keberpihakan.Pemerintah> . Diakses pada tanggal 11 November Pukul 16.55

#### **Internet**

Anonim.2014. *Minimarket Tumbuh Pesat*. Dalam <http://berita.suaramerdeka.com/sm cetak/minimarket-tumbuh-pesat/>. Diakses pada tanggal 11 November 2015 Pukul 16.20

Sutrisno, Rachmad Dendy. 2013. *KPPU: Pemerintah Harus Tegas Terhadap Persaingan Ritel*. Dalam <http://www.kppu.go.id/id/blog/2013/05/kppu-pemerintah-harus-tegas-terhadap-persaingan-ritel/> . Diakses pada tanggal 11 November Pukul 16.55

Badan Pusat Statistik Tahun 2015

Perwal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Toko Modern Minimarket Kota Semarang

Perpres RI Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Permendag RI Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Faisol, Edi.2013. *Pasar Modern Sesaki Kota Semarang*. Dalam <http://bisnis.tempo.co/read/new>

Sari, Valenta Elisa.2015. *Asosiasi Pengusaha Rayu Jokowi Perlunak Aturan Pengupahan*. Dalam <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150929125336-92-81566/asosiasi-pengusaha-rayu-jokowi-perlunak-aturan-pengupahan/> . Diakses pada tanggal 11 November Pukul 17.00